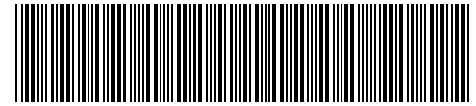




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.400359/2025**



DS:4823-6035-5633-3794

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
3. Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH
4. Kode>Nama Satker : (400359) PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
- Sebesar : Rp. 447.628.000 ( EMPAT RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang  
Rp. 447.628.000  
Rp. 447.628.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	447.628.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PALANGKARAYA (043) Rp. 447.628.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400359/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4823-6035-5633-3794

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH  
Kode>Nama Satker : (400359) PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Halaman : I A. 1

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			447.628.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			447.628.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum			
		2. 01	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu			
		3. 01	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum			
		4. 02	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara			
		5. 03	Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.AEA	Koordinasi	13,00	kegiatan	178.000.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	12,00	kegiatan	153.000.000
		02 AEA.003	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1,00	kegiatan	25.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	52,00	orang	186.738.000
Rincian Output	:	01 AEF.001	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	52,00	orang	186.738.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	240,00	Perkara, Berkas Perkara	82.890.000
Rincian Output	:	01 BCA.U06	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Tengah	208,00	Perkara	63.630.000
		02 BCA.U07	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di Wilayah Tengah	32,00	Perkara	19.260.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

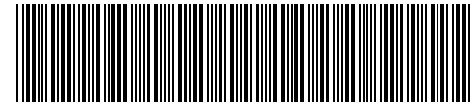
ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**NOMOR : DIPA- 005.03.2.400359/2025**

**I B. SUMBER DANA**



DS:4823-6035-5633-3794

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
 Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH  
 Kode>Nama Satker : (400359) PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Halaman : I B. 1

		Rp.	447.628.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Anggaran Tahun 2025					(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni		Rp.	447.628.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB		Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung		Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
6. SBSN PBS		Rp.	0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :									(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400359/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4823-6035-5633-3794

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH  
Kode>Nama Satker : (400359) PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400359	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	-	447.628	-	-	-	447.628		
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	447.628	-	-	-	447.628		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	447.628	-	-	-	447.628		
1049.AEA	Koordinasi (14.51 KALIMANTAN TENGAH / KOTA PALANGKARAYA)	-	178.000	-	-	-	178.000	14 . 51	
01	RM	-	178.000	-	-	-	178.000	043@	
1049.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (14.51 KALIMANTAN TENGAH / KOTA PALANGKARAYA)	-	186.738	-	-	-	186.738	14 . 51	
01	RM	-	186.738	-	-	-	186.738	043@	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (14.51 KALIMANTAN TENGAH / KOTA PALANGKARAYA)	-	82.890	-	-	-	82.890	14 . 51	
01	RM	-	82.890	-	-	-	82.890	043@	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>447.628</b>	-	-	-	<b>447.628</b>		

Jakarta, 02 Desember 2024  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400359/2025  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4823-6035-5633-3794

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH  
Kode>Nama Satker : (400359) PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

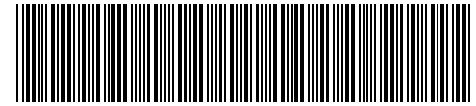
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	400359	<b>PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	6.226	6.226	6.302	6.240	6.304	159.260	7.696	6.906	7.673	217.914	6.176	10.705	447.628
		<b>BELANJA BARANG</b>	6.226	6.226	6.302	6.240	6.304	159.260	7.696	6.906	7.673	217.914	6.176	10.705	447.628
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	6.226	6.226	6.302	6.240	6.304	159.260	7.696	6.906	7.673	217.914	6.176	10.705	447.628
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	6.226	6.226	6.302	6.240	6.304	159.260	7.696	6.906	7.673	217.914	6.176	10.705	447.628
		<b>PERKIRAAN PENERIMAAN</b>	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	115	1.270
		- PNB (425239)	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	115	1.270

Jakarta, 02 Desember 2024  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400359/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:4823-6035-5633-3794

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : [14] KALIMANTAN TENGAH  
Kode dan Nama Satker : [400359] PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>400359</b>	<b>PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA</b>		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	166.999
	52 Belanja Barang	Rp.	166.999
<b>005.03.BF 1049</b>	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</b>		
<b>1049.AEA</b>	<b>Koordinasi</b>		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	68.850
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	7.650
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
<b>1049.AEF</b>	<b>Sosialisasi dan Diseminasi</b>		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	88.069
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
<b>1049.BCA</b>	<b>Perkara Hukum Perseorangan</b>		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.430
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400359/2025  
IV B. C A T A T A N**



DS:4823-6035-5633-3794

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : [14] KALIMANTAN TENGAH  
Kode dan Nama Satker : [400359] PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002